



**BUPATI PURBALINGGA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 180/246 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 180/33 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA RENCANA  
AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DI KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2018**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan beralihnya Bagian Hukum Sekretariat menjadi bagian rumpun Asisten Pemerintahan dan Kesra berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga maka perlu mengubah Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 180/33 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Purbalingga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 180/33 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 180/33 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Para Anggota Panitia RANHAM yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 180/ TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
 PURBALINGGA NOMOR 180/33 TAHUN 2018  
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA RENCANA  
 AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
 ANGGARAN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI  
 MANUSIA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Plt. Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
5.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Satpol PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	
16.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Anggota
22.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	Anggota
23.	Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
25.	Kasubbag Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

6-5-1

1	2	3
26.	Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
27.	8 (delapan) orang pelaksana Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
28.	1 (satu) orang pelaksana Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI